



**KONDISI SOSIOKULTURAL YANG MEMPENGARUHI  
PEMANFAATAN BANTUAN PKH DI NAGARI SUNGAI SARIAK**

**Shahibul Ihsan<sup>1\*</sup>; Syahrizal<sup>2</sup>; Sri Meiyenti<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>*Departemen Antropologi Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  
Andalas-Padang-Indonesia*

*\*Corresponding Author; [shahibulhsan27@gmail.com](mailto:shahibulhsan27@gmail.com)*

**Received:** 27 April 2023

**Accepted:** 27 Juni 2024

**Published:** 30 Juli 2024

**Abstract**

*The Family Hope Program (PKH) requires aid recipients to utilize the aid received in the education and/or health sectors. However, in implementation, there are still various ways of utilizing aid, this is due to the different socio-cultural conditions in each community. This research aims to determine the sociocultural conditions that influence how PKH assistance is utilized. The research was conducted in Nagari Sungai Sariak, one of the Nagari in Padang Pariaman Regency which has the most recipients of PKH assistance. This research uses qualitative research methods and a case study approach, and collects data by means of observation and interviews. The results of this research show various ways of using aid in nagari, some are used to meet educational and health needs, but there are also many other ways, such as buying rice or even buying clothes. This is because of the socio-cultural conditions in the nagari, in the form of the wife having more power at home, so the management of aid is controlled by the wife.*

**Keywords:** *Assistance Management, Poverty, Social Assistance, Sociocultural, PKH*

## **A. Pendahuluan**

Kemiskinan tetap menjadi masalah yang serius di Indonesia, ditunjukkan oleh tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Sejak 10 tahun terakhir, tahun 2012, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami fluktuasi dengan beberapa penurunan tetapi tidak mencapai tingkat yang memadai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut data BPS (2023), jumlah penduduk miskin di Indonesia hanya mengalami penurunan sebesar 2,35 juta dalam 10 tahun terakhir, dan saat ini masih ada sekitar 26,36 juta jiwa atau sekitar 9,57% dari total penduduk yang hidup dalam kemiskinan.

Angka kemiskinan yang tinggi ini menunjukkan perlunya program penanggulangan kemiskinan di Indonesia, seperti Program Keluarga Harapan (PKH). PKH adalah program bantuan sosial bersyarat untuk keluarga miskin yang terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berdasarkan PERMENSOS No 1 Tahun 2018. KPM harus memenuhi persyaratan dalam tiga komponen: kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. KPM yang termasuk dalam komponen kesehatan harus menggunakan insentif bantuan untuk keperluan kesehatan seperti pemeriksaan ibu hamil/nifas, gizi anak, dan imunisasi. KPM dalam komponen pendidikan harus menggunakan bantuan untuk pendidikan anak dan memastikan kehadiran mereka di sekolah. Sementara itu, komponen kesejahteraan sosial melibatkan penyandang disabilitas berat dan lansia yang harus menjalani pemeriksaan kesehatan rutin (Permensos, 2018).

Tujuan dari bantuan sosial PKH adalah meningkatkan taraf hidup KPM, mengurangi kemiskinan, mempermudah akses ke layanan kesehatan dan pendidikan, mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, dan mendorong perubahan perilaku menjadi lebih mandiri (Kemensos RI, 2020:22). Namun, masih ada banyak KPM yang tidak memanfaatkan insentif bantuan sesuai dengan ketentuan. Beberapa KPM menggunakan bantuan untuk keperluan di sektor pendidikan dan kesehatan (Syahrial & Desrina, 2022). Namun banyak juga tidak, Misalnya, ada yang menggunakan bantuan PKH untuk membeli barang konsumtif

seperti HP, rokok, atau motor (Nainggolan, 2012). Selain itu, ada juga yang menggunakan bantuan untuk membeli makanan pokok karena masih menganut perilaku subsisten (Habibullah et al., 2017), atau berbagi dengan masyarakat miskin lainnya karena nilai dan norma dalam masyarakat mereka (Raidar & Junaidi, 2021). Ada pula yang menggunakan bantuan untuk membayar arisan sebagai bentuk menabung (Imama & Yulistiyono, 2020).

PKH diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui akses yang lebih baik ke layanan pendidikan dan kesehatan (Permensos, 2018). Penggunaan bantuan di luar sektor pendidikan dan kesehatan dapat menghambat pencapaian tujuan program dan menciptakan ketergantungan ekonomi (Muin & Rosdiana, 2020). Oleh karena itu, diperlukan penelitian mengenai pola perilaku penerima manfaat dalam memanfaatkan bantuan yang mereka terima.

Implementasi kebijakan ini dapat berbeda-beda karena faktor sosiokultural yang berbeda di setiap masyarakat. Faktor sosiokultural memengaruhi bagaimana masyarakat merespons dan berperilaku terhadap program pembangunan, karena melibatkan nilai, norma, dan struktur sosial dalam masyarakat (Marzali, 2009:76). Penelitian ini akan fokus pada bagaimana penerima manfaat PKH memanfaatkan bantuan sosial yang mereka terima, serta melihat kondisi sosiokultural yang mempengaruhinya. Penelitian ini dilakukan di Nagari Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, yang dihuni oleh masyarakat dengan budaya Minangkabau.

## **2. Metodologi**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, di mana peneliti terlibat secara langsung dalam situasi yang sedang diteliti, dan data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan analisis kata-kata. Pendekatan ini mengutamakan proses dan menganalisis data secara induktif untuk mencari makna dan nilai yang terkandung di dalamnya (Bogdan & Biklen, 1982 dalam Sugiyono, 2013:13). Selain itu, penelitian ini

menggunakan pendekatan studi kasus, di mana peneliti mendalami suatu kasus tertentu dan mengumpulkan data secara detail (Cresswell, 2014). Pendekatan studi kasus ini memungkinkan peneliti untuk menyelidiki secara mendalam mengapa suatu kasus terjadi dan apa yang melatarbelakanginya.

Penelitian ini berlokasi di Nagari Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Nagari Sungai Sariak dipilih karena merupakan salah satu Nagari di Kabupaten Padang Pariaman yang memiliki jumlah penerima manfaat PKH terbanyak, saat ini di Nagari terdapat 212 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH (data pendamping PKH).

Dalam penelitian ini, informan merupakan individu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait dengan masalah yang sedang diteliti, serta bersedia berpartisipasi dalam penelitian (Creswell, 2014:207). Penelitian ini menggunakan strategi non-probabilitas dalam pemilihan informan dengan menggunakan purposive sampling. Informan dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang ditentukan oleh peneliti. Penelitian ini terdiri dari dua jenis informan, yaitu informan pengamat dan informan pelaku. Informan pengamat memiliki pengetahuan tentang masalah penelitian, tetapi tidak memiliki pengalaman langsung terkait fenomena yang sedang diteliti. Informan pengamat dalam penelitian ini meliputi pendamping program PKH, ketua kelompok PKH, Wali Nagari, dan Wali Korong. Sementara itu, informan pelaku adalah individu yang memiliki pengetahuan mendalam tentang masalah penelitian dan telah mengalami secara langsung fenomena yang sedang diteliti. Informan pelaku dalam penelitian ini adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah menjadi KPM PKH selama lebih dari satu tahun, dan telah menerima dan menggunakan berbagai jenis bantuan dari PKH. Dalam pemilihan informan pelaku, peneliti juga mempertimbangkan representativitas dari setiap komponen PKH yang berbeda, variasi pekerjaan atau sumber ekonomi, serta mencakup seluruh kategori komponen yang ada.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### a. Pemanfaatan Bantuan Sosial PKH di Nagari

Nagari Sungai Sariak adalah sebuah wilayah yang memiliki jumlah penerima bantuan sosial PKH (Program Keluarga Harapan) yang signifikan, dengan total 212 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dalam jumlah tersebut, terdapat 159 KPM yang menerima bantuan untuk pendidikan, 32 KPM untuk kesehatan, dan 64 KPM untuk kesejahteraan sosial (Data Pendamping PKH). Penting untuk dicatat bahwa jumlah KPM berdasarkan komponen lebih besar daripada jumlah KPM secara keseluruhan, karena satu KPM dapat menerima lebih dari satu komponen bantuan. Misalnya, dalam satu keluarga dapat terdapat anak yang sedang bersekolah, balita, dan lansia, sehingga dihitung sebagai tiga komponen yang berbeda.

Dalam Nagari Sungai Sariak, KPM PKH memiliki berbagai cara dalam memanfaatkan bantuan sosial yang mereka terima. Uang bantuan tersebut digunakan sesuai dengan ketentuan program, yang meliputi pendidikan dan kesehatan. Namun, terdapat juga penggunaan uang bantuan untuk keperluan lain seperti membeli bahan makanan, menabung, mengembangkan usaha, atau memenuhi kebutuhan konsumtif seperti pembelian pakaian.

Sebagian besar KPM di Nagari Sungai Sariak menggunakan uang bantuan pertama kali untuk membeli beras. Ketika ditanya mengenai prioritas pembelian mereka, hampir semua KPM menjawab bahwa beras menjadi hal utama yang mereka beli. Rata-rata mereka membeli dua karung beras, di mana setiap karung berisi sekitar 10 kg, dengan harga berkisar antara Rp140.000 hingga Rp150.000 per karung. Dengan demikian, jumlah uang yang digunakan untuk membeli beras berkisar antara Rp280.000 hingga Rp300.000. Namun, dalam beberapa kasus, KPM dapat membeli hingga empat hingga enam karung beras, terutama ketika mereka menghadapi kesulitan ekonomi seperti kurangnya pendapatan atau ketiadaan nafkah dari suami. Hal ini berarti bahwa uang bantuan dapat habis sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan beras, sehingga menyisakan sedikit atau bahkan tidak ada lagi dana untuk memenuhi kebutuhan kesehatan atau pendidikan anak. Oleh karena itu, sangat

penting bagi KPM untuk memiliki sumber pendapatan dan pekerjaan selain mengandalkan bantuan sosial.

Pembelian beras sebagai prioritas ini terkait dengan kenyataan bahwa sebagian besar KPM di Nagari Sungai Sariak tidak bekerja sebagai petani dan tidak memiliki lahan pertanian yang dapat mereka garap. Meskipun sebagian besar KPM merupakan penduduk asli Nagari, mereka hanya menerima warisan berupa rumah dan tanah, bukan ladang atau sawah yang dapat mereka manfaatkan. Oleh karena itu, mereka harus membeli beras sebagai sumber kebutuhan pokok. Penggunaan uang bantuan untuk membeli beras sering kali dijelaskan oleh KPM sebagai "pinjaman", karena mereka menganggap bahwa mereka hanya meminjam uang tersebut dan akan mengembalikannya jika ada sumber pendapatan lain yang tersedia.

Selain itu, uang bantuan PKH juga digunakan oleh KPM sesuai dengan komponen bantuannya, seperti untuk pendidikan. Uang insentif PKH digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, termasuk pembelian seragam sekolah dan peralatan sekolah. Ketika seragam dan peralatan tersebut rusak atau tidak layak pakai, uang bantuan juga digunakan untuk membeli perlengkapan baru pada awal semester. Untuk KPM yang memiliki anak di jenjang SMA, uang bantuan sering digunakan untuk membayar iuran sekolah bulanan.

Dalam komponen kesehatan, terutama untuk anak usia dini, uang bantuan PKH sering kali digunakan untuk membeli susu formula. Pendamping PKH menyarankan agar susu formula diberikan kepada anak hingga usia 5 tahun untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka. Oleh karena itu, kebanyakan KPM pada kategori ini menggunakan uang bantuan untuk membeli susu formula dengan harga yang bervariasi, yaitu sekitar Rp30.000 hingga Rp60.000 per kotak, yang cukup untuk digunakan selama dua hingga lima hari. KPM umumnya merasa khawatir jika mereka tidak memberikan susu formula kepada anak balita, karena mereka meyakini bahwa salah satu penyebab stunting adalah kurangnya asupan nutrisi yang mencukupi. Selain itu, mereka juga khawatir bahwa jika pihak PKH

mengetahui bahwa anak mereka mengalami stunting, bantuan sosial mereka dapat dicabut.

Dalam beberapa kasus, uang bantuan PKH juga digunakan untuk kebutuhan konsumtif, seperti pembelian pakaian untuk ibu atau perabotan rumah tangga. Alasan di balik penggunaan uang bantuan untuk kebutuhan konsumtif ini adalah bahwa KPM merasa bahwa biaya pendidikan anak mereka sudah tercukupi melalui penghasilan yang dikirimkan oleh anak-anak mereka yang sudah bekerja. Oleh karena itu, mereka menganggap bahwa uang bantuan PKH tidak lagi diperlukan untuk kebutuhan pendidikan. KPM semacam ini pada dasarnya sudah mampu secara finansial, tetapi mereka masih ingin mendapatkan uang tambahan melalui program PKH.

#### b. Kondisi Sosiokultural yang Memengaruhi Pemanfaatan Bantuan PKH

Masyarakat Nagari Sungai Sariak merupakan masyarakat yang homogen, hampir seluruh anggota masyarakatnya memiliki sukubangsa yang sama, yakni sukubangsa Minangkabau. Jadi kondisi sosiokultural di Nagari, umumnya sama seperti masyarakat Minangkabau lainnya, seperti memakai pengambilan garis keturunan dari pihak ibu atau biasa disebut sebagai matrilineal. Jadi anak di keluarga akan menggunakan garis keturunan ibu.

Walaupun kulturnya cenderung sama, namun dalam konteks tradisi pernikahan di masyarakat Nagari Sungai Sariak, terdapat perbedaan dari sukubangsa Minangkabau pada umumnya, misalnya terdapat adat uang jempunan di mana pihak perempuan (keluarga istri) menjemput calon suami dengan membawa sejumlah uang sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga pria yang telah membesarkan calon istri. Adat ini dilakukan karena setelah pernikahan, pengantin baru akan tinggal di sekitar kerabat istri, dan suami menjadi orang yang menumpang di rumah keluarga istri. Dalam lingkungan ini, istri memiliki hak milik terhadap tanah dan rumah. Hal ini menjadikan istri memiliki kedudukan yang lebih kuat di dalam rumah tangga. Ia bertanggung jawab dalam mengatur keuangan keluarga dan menjalankan tugas-tugas rumah tangga

seperti mengurus anak, memasak, dan tugas-tugas pokok lainnya. Dalam pengaturan keuangan keluarga, peran utama juga diambil oleh istri, sementara suami bertanggung jawab mencari nafkah dan menyerahkan pendapatan kepada istri. Keputusan ini didasarkan pada keyakinan bahwa istri memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan keluarga dan dapat mengelola keuangan dengan lebih efektif.

Mengingat peran istri sebagai pemilik rumah, baik dalam kepemilikan tanah maupun bangunan rumah, serta tanggung jawabnya dalam mengurus kebutuhan rumah tangga, tidak mengherankan jika ia juga menjadi orang yang lebih berkuasa di rumah, serta ia juga berkuasa penuh dalam pengelolaan uang bantuan PKH. Ibu dianggap sebagai pihak yang lebih tepat untuk mengelola bantuan tersebut karena pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan keluarga. Dalam banyak kasus, ibu KPM memegang kendali penuh atas pengelolaan uang bantuan PKH tanpa adanya pengawasan dari anggota keluarga lainnya. Uang bantuan sering dialokasikan untuk membantu ibu melaksanakan tugas-tugasnya dalam keluarga, seperti membeli bahan makanan seperti beras dan lauk pauk, serta memenuhi kebutuhan merawat anak seperti membeli susu formula. Uang bantuan juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, seperti pembelian perlengkapan alat tulis, pembayaran uang sekolah, dan penggantian pakaian seragam sekolah. Karena kewajiban ibu dalam mengurus dapur keluarga, merawat anak, dan tugas-tugas rumah tangga lainnya, ia mengalokasikan sebagian besar uang bantuan yang diterima untuk memenuhi kebutuhan ini. Namun, pada beberapa kasus juga ditemukan penggunaan insentif PKH untuk keperluan konsumtif seperti pembelian pakaian, karena ibu memiliki pengelolaan penuh atas uang bantuan PKH tanpa pengawasan dari anggota keluarga lainnya.

#### **4. Kesimpulan**

Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin penerima bantuan, dengan cara mempermudah mereka dalam mengakses pelayanan kesehatan dan pendidikan, karena itulah penerima bantuan PKH diwajibkan



menggunakan dana bantuan untuk memenuhi kebutuhan di sektor pendidikan dan kesehatan. namun dalam implementasinya, masih beragam cara pemanfaatan bantuan yang dilakukan, ada yang memanfaatkan sesuai dengan ketentuan yaitu ke sektor pendidikan dan/atau kesehatan, namun banyak juga yang memanfaatkan bantuan diluar ketentuan misalnya untuk makanan pokok seperti beras, bahkan untuk barang konsumtif seperti baju.

Pemanfaatan bantuan ini dipengaruhi oleh kondisi sosiokultural masyarakat, misalnya di Nagari Sungai Sariak, karena keluarga tinggal di lingkungan kerabat istri (matrilokal), dan istrilah sebagai pemilik rumah dan tanah, istri menjadi lebih berkuasa di rumah. Istri menganggap ia lah yang lebih cocok mengelola uang bantuan PKH, tanpa melibatkan anggota keluarga lain seperti suami dan anak. Karena itu, uang bantuan jadi banyak dialokasikan untuk membantu istri dalam melaksanakan tugasnya dalam keluarga seperti membeli beras untuk kebutuhan makan keluarga, membeli segala keperluan anak seperti susu formula sampai perlengkapan sekolah anak. Namun ada juga ditemukan, istri yang menggunakan uang bantuan untuk keinginannya, seperti dibelikan pada baju.

## Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik, "Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023", Badan Pusat Statistik, 17, Juli 2023. diakses dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html> pada 19 Juli 2023.
- Creswell, John W, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Habibullah, et.al, *Pemanfaatan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan*. Jakarta: P3KS Press, 2017.
- Imama, W. N., & Yulistiyono, H, "Pola Perilaku Konsumsi Keluarga Penerima Manfaat Pkh (Program Keluarga Harapan) Di Kelurahan Pejagan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan". *Jurnal Nusantara Aplikasi Manajemen Bisnis*, 5(2), 221-232. 2020.
- Kementerian Sosial RI, *Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2020*.
- Marzali, A, *Antropologi & Pembangunan Indonesia*. Prenada Media. 2009.

- Muin, R., & Rosdiana, R, Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Penerima Bantuan Di Desa Laliko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar. *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*, 5(2), 130-147.2020.
- Nainggolan, T. d, Tinjauan Tentang Pelaksanaan PKH di Indonesia (Studi Tentang Dampak PKH pada RTSM di 7 Provinsi). Jakarta: P3KS Press, 2012.
- Permensos No 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
- Prakoso, A. B, "Pola Konsumsi Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Gebangmalang Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto." *Paradigma*, 4(1). 2016.
- Raidar, U., & Junaidi, J, "Perubahan Pola Adaptasi Masyarakat Miskin Penerima Manfaat PKH di Masa Pandemi Covid-19." *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*, 23(2), 189-210. 2021.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2013.
- Syahrial, S., & Desrina, T, "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam